

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS BELANJA PEMILU TAHUN 2024: MEKANISME PEMBELANJAAN, PERENCANAAN ANGGARAN, EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN DAN BELANJA TAHAPAN PEMILU 2024**

Lily Yuliana<sup>1</sup>, Cris Kuntadi<sup>2</sup>, R. Luki Karunia<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Terapan, STIA LAN Jakarta, email: [lily.2443021070@stialan.ac.id](mailto:lily.2443021070@stialan.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: [cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>3</sup> Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta, Email: [luki@stialan.ac.id](mailto:luki@stialan.ac.id)

*Corresponding author: Lily Yuliana'*

| Received: 15-10-2024

| Revised: 16-10-2024

|| Accepted: 17-10-2024

### **Abstract:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024 menggunakan studi literatur. Artikel ini mereview faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024, yaitu perencanaan anggaran, mekanisme pembelanjaan dan tahapan pemilu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan analisis dokumen. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024, mekanisme pembelanjaan berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024, dan tahapan pemilu berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024.

**Keywords:** Efektivitas Belanja Pemilu Tahun 2024, Perencanaan Anggaran, Mekanisme Pembelanjaan, Belanja Negara, dan Tahapan Pemilu



## Introduction

Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selalu mendapat perhatian khusus masyarakat karena dinamika politik hingga tingginya anggaran yang dibutuhkan, khususnya Pemilu Tahun 2024 ini. Sekitar 76 Triliun dana dikucurkan kepada tiga penyelenggara untuk menghadapi proses Pemilu. Ditengah kucuran anggaran yang tidak sedikit, efektivitas belanja tentu menjadi tuntutan yang harus dilakukan agar anggaran yang dipakai tepat sasaran. Pemilu Serentak di Tahun 2024 ini merupakan salah satu kegiatan politik terbesar yang diselenggarakan di Indonesia, sehingga anggaran yang sangat besar pula kemudian dialokasikan untuk memastikan jalannya proses demokrasi ini. Dilansir melalui website Kementerian Keuangan, pada tahun 2022, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,1 T, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp30,4 T dan saat terselenggaranya pemilu pada tahun 2024 alokasi anggaran terus bertambah mencapai Rp38,3 T. Anggaran ini mencakup berbagai aspek operasional seperti logistik, pelatihan petugas pemilu, pengadaan peralatan, pengembangan teknologi, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Dengan besarnya dana yang dihabiskan, evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting, guna memastikan bahwa anggaran tersebut dikelola secara efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja adalah proses evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemilu, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai seberapa baik penyelenggara pemilu (seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP) menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Selain pengukuran kinerja, pengukuran efektivitas juga merupakan hal yang penting dalam mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Dapat dikatakan bahwa pengukuran efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan anggaran besar yang dikeluarkan, pengukuran kinerja dan efektivitas tidak hanya memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar, tetapi juga memberikan nilai tambah dengan memastikan bahwa tujuan strategis pemilu, yaitu demokrasi yang adil, transparan, dan partisipatif dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah mekanisme pembelanjaan berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024?
2. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024?
3. Apakah tahapan pemilu berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024?

## Literature Review

Mekanisme pembelanjaan negara merujuk pada prosedur, aturan, dan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola pengeluaran negara. Di Indonesia, mekanisme ini diatur oleh berbagai regulasi dan dijalankan oleh institusi keuangan seperti Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara.

Pelaksanaan anggaran (*budget execution*) adalah tahapan pada saat sumber daya digunakan untuk implementasi kebijakan dikaitkan dengan anggaran yang disediakan. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan anggaran adalah implementasi anggaran yang formulasinya disusun dengan baik namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, namun di sisi lain tidak memungkinkan untuk mengimplementasikan anggaran dengan baik yang formulasinya disusun dengan kualitas yang tidak maksimal. Menurut Anthony dan Govindarajan (2007), pengelolaan anggaran yang efektif memerlukan sistem manajemen yang baik untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya

dilakukan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Ini termasuk pengendalian anggaran dan evaluasi kinerja anggaran secara berkala.

Perencanaan anggaran merujuk pada teori perencanaan anggaran menurut Mardiasmo (2009; 33) merupakan strategi organisasi dalam menentukan target dan tujuan organisasi. Dalam perencanaan terdiri atas kegiatan bersifat strategi, taktis serta mengaitkan pada aspek yang diterapkan sekaligus bermanfaat. Adapun dimensi yang dipakai yaitu menurut Mahsun (2017; 146) perencanaan anggaran terdiri dari dua, yaitu formulasi kebijakan anggaran (*Budget Policy Formulation*) dan Perencanaan Operasional Anggaran (*Budget Operational Planning*). Dimana perencanaan anggaran memiliki dimensi sebagai berikut: 1. Formulasi Kebijakan Anggaran Formulasi kebijakan anggaran merupakan penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar dalam perencanaan operasional. 2. Perencanaan Operasional Anggaran Perencanaan operasional adalah penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber sumber daya

Menurut Ravianto (dalam Rosdiana, 2022:3), efektivitas merupakan sebuah tolak ukur seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan. Dalam hal ini suatu pekerjaan dianggap efektif jika diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik waktu, biaya, maupun mutunya. Apabila ada sesuatu yang tidak terpenuhi maka nilai efektivitas akan berkurang.

Mardiasmo (2004:134) sebagaimana dikutip Alisman (2014:50), menyatakan bahwa efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Dari pendapat diatas, maka efektivitas dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian yang ingin dicapai oleh organisasi.

Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dari akitivitas pemerintah baru tersebut baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja telah selesai dilaksanakan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja negara. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa agar proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi *nonprofit* memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tapi bukan berarti mereka dapat mengeluarkan uang (belanja) dengan seenaknya. Auditor pemerintah juga memberi perhatian lebih pada audit atas belanja, karena pada kenyataannya sebagian besar kebocoran APBN terletak pada pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut dapat disebabkan oleh adanya praktik KKN maupun karena ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja.

Belanja negara yang tidak semestinya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu 1) *overspending* (belanja yang melebihi kebutuhan), 2) *misspending* (belanja yang tidak sesuai kebutuhan), 3) *underspending* (belanja yang tidak terlaksana) 4) *fraud spending* (belanja yang melanggar ketentuan hukum). Kesalahan proses belanja ini disebabkan oleh beberapa hal, untuk kategori 1), 2), dan 3) pada umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja. Adapun untuk kategori 4) disebabkan oleh adanya oknum penyelegara negara yang secara sengaja melakukan penyelewengan atas pelaksanaan belanja.

Secara garis besar Tahapan Pemilu terdiri dari perencanaan dan penyusunan peraturan pemilu, pendaftaran pemilih, pendaftaran dan verifikasi calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, pengumuman hasil pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, dan pelantikan calon terpilih.

Table 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	Ulfa Tarina; M. Rifqi Febrian; Indah Cahyaning P; Wirawan Firman Nurcahya (2024)	Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Negara dalam Pemilihan Umum	Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Pemilihan Umum, dan Tahapan Pemilu	Penulis menggunakan variabel lain yaitu analisis kebijakan ekonomi
2	Cris Kuntadi, Dian Rosdiana (2022)	Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi ( <i>Literature Review</i> )	Efektivitas Penyerapan Anggaran dan Perencanaan Anggaran	Penulis menggunakan variabel lain yaitu pengaruh peraturan dan koordinasi
3	Dwi Astrianti Defretes; Kristoforus Laga Kleden (2023)	Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024	Mekanisme Pembelanjaan & Tahapan Pemilu berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Pemilu	Terdapat variabel partisipasi masyarakat dan perbandingan pemilu serentak dengan pemilu sebelumnya
4	Kiky Rizky Fitrianty (2019)	Evaluasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Perencanaan Anggaran & Mekanisme Pembelanjaan berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Pemilu	Penulis menggunakan studi empiris
5	Abdul Rahman (2023)	Analisis Tata Kelola Penganggaran Pemilu Kota Padang Tahun 2018	Tata Kelola Penganggaran atau Mekanisme Penganggaran	Penulis menggunakan variabel lain yaitu tata kelola penganggaran
.6	Aryojati Ardipandanto (2019)	Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019	Pemilu	Permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019

7	Anne Putri; Nono Afriyanto (2022)	Evaluasi Perencanaan dan Penggunaan Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2016–2021: Studi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Mekanisme Penganggaran dan Proses Penggunaan Anggaran Belanja	Proses penggunaan anggaran belanja
---	--	---	---	------------------------------------

## Method

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *offline* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## Results and Discussion

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

### Pengaruh Mekanisme Pembelanjaan terhadap Efektivitas Belanja Pemilu Tahun 2024

Mekanisme Pembelanjaan berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Pemilu Tahun 2024, pada prinsipnya mekanisme pembelanjaan berhubungan dengan pelaksanaan anggaran. Dimana dalam Pelaksanaan anggaran yang efisien terdapat beberapa indikator yakni:

1. Kepastian bahwa anggaran akan diimplementasikan sesuai dengan otorisasi yang diperoleh dari Undang-Undang baik aspek yang terkait dengan keuangan dan kebijakan; dan
2. Mengadaptasi/menyesuaikan pelaksanaan anggaran terhadap perubahan-perubahan yang signifikan dalam ekonomi makro.

Mardiasmo (2009) menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik, termasuk anggaran pemilu. Rosser (2004) menjelaskan bahwa penggunaan anggaran untuk meningkatkan partisipasi publik, seperti dalam sosialisasi pemilu, dapat memperkuat demokrasi dan legitimasi proses pemilu. Anggaran yang difokuskan pada kampanye kesadaran publik sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Mekanisme pembelanjaan yang baik sangat penting dalam meningkatkan efektivitas belanja pemilu 2024. Pengelolaan yang transparan, efisien, dan akuntabel tidak hanya membantu mengurangi potensi penyimpangan tetapi juga memastikan setiap pengeluaran berdampak positif pada kualitas dan legitimasi pemilu.

### Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Efektivitas Belanja Pemilu Tahun 2024

Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Belanja Pemilu Tahun 2024, dimana dimensi atau indikator Perencanaan Anggaran yakni Formulasi Kebijakan Anggaran dan Perencanaan

Operasional Anggaran. Pengaruh perencanaan anggaran sangat penting, karena perencanaan yang baik akan memastikan bahwa dana dialokasikan dan digunakan secara optimal, dapat memastikan alokasi yang tepat, efisiensi dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas

#### Pengaruh Tahapan Pemilu terhadap Efektivitas Belanja Pemilu Tahun 2024

Tahapan Pemilu berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024 karena pada setiap tahapan membutuhkan alokasi dana yang berbeda-beda. Pengelolaan anggaran yang tepat dalam setiap fase pemilu akan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemilu yang berkualitas, adil, dan transparan. Setiap tahap memerlukan pengelolaan anggaran yang berbeda-beda, dan perencanaan serta eksekusi yang baik dalam setiap tahapan sangat menentukan efektivitas penggunaan dana secara keseluruhan. Tahapan pemilu yang dikelola dengan baik akan meminimalkan risiko pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu.

#### Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di peroleh kerangka berpikir artikel seperti di bawah ini.

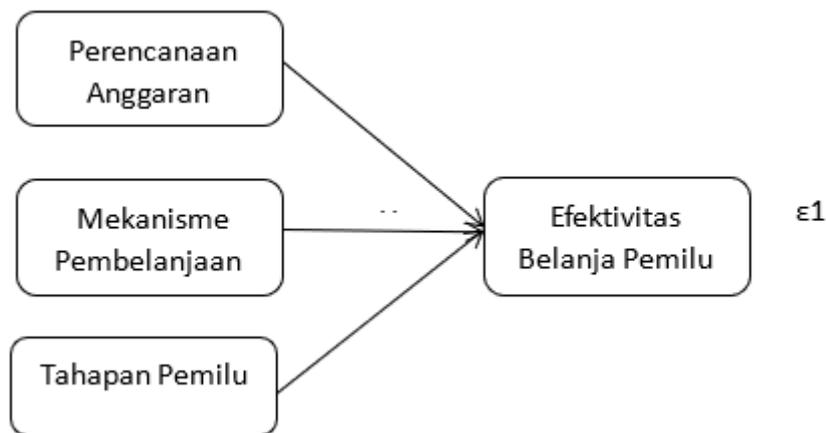


Figure 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar conceptual framework di atas, perencanaan anggaran, mekanisme pembelanjaan, dan tahapan pemilu berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- 1) analisis kebijakan ekonomi, Ulfa Tarina; M. Rifqi Febrian; Indah Cahyaning P; Wirawan Firman Nurcahya (2024);
- 2) pengaruh peraturan dan koordinasi, Cris Kuntadi, Dian Rosdiana (2022);
- 3) partisipasi masyarakat dan perbandingan pemilu serentak dengan pemilu sebelumnya, Dwi Astrianti Defretes; Kristoforus Laga Kleden (2023);
- 4) tata kelola penganggaran, Abdul Rahman (2023);
- 5) Permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019, Aryojati Ardipandanto (2019);
- 6) Proses penggunaan anggaran belanja, Anne Putri; Nono Afriyanto (2022).

#### Conclusion

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024.

- Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu tahun 2024 karena perencanaan yang baik akan memastikan bahwa dana dialokasikan dan digunakan secara optimal. Ketika perencanaan dilakukan dengan jelas dan transparan, risiko penyalahgunaan anggaran atau pengalokasian dana yang tidak tepat akan berkurang. Kemudian juga dapat memastikan alokasi yang dilakukan tepat, terjadinya efisiensi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam Belanja itu sendiri. Perencanaan anggaran yang tepat sasaran memungkinkan KPU fokus pada pengeluaran yang bersifat prioritas dan mendesak, sehingga belanja anggaran yang dilakukan menjadi lebih efisien
2. Mekanisme pembelanjaan berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024. Mekanisme pembelanjaan yang baik sangat penting dalam meningkatkan efektivitas belanja pemilu 2024. Pengelolaan yang transparan, efisien, dan akuntabel tidak hanya membantu mengurangi potensi penyimpangan tetapi juga memastikan setiap pengeluaran berdampak positif pada kualitas dan legitimasi pemilu. Mekanisme yang jelas dan transparan memastikan setiap pengeluaran dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Hal ini menciptakan efisiensi dalam penggunaan dana belanja pemilu. Mekanisme pembelanjaan yang teratur menjamin bahwa pengeluaran dilakukan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan tahapan pemilu, sehingga tidak terjadi kelambatan yang bisa merugikan jalannya proses pemilu. Efektivitas belanja Pemilu akan lebih terjamin apabila mekanisme pembelanjaannya dilakukan dengan profesional, berorientasi pada hasil, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi di lapangan.
  3. Tahapan Pemilu berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024. Tahapan Pemilu berpengaruh terhadap efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024 karena pada setiap tahapan pemilu kebutuhan anggaran bisa sangat berbeda. Alokasi dana yang sesuai untuk setiap tahap akan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran karena setiap tahapan memiliki tantangan dan dinamika yang berbeda, sehingga pengelolaan anggaran juga harus fleksibel. Menjadi penting untuk menjaga keseimbangan belanja di setiap tahapan pemilu, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Dengan pembagian anggaran yang proporsional pada setiap tahapan, efektivitas belanja akan lebih terjaga, mengurangi risiko pemborosan, dan memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan lancar sesuai dengan rencana.

## Acknowledgement

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dari pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024, selain dari perencanaan anggaran, mekanisme pembelanjaan, dan tahapan pemilu pada semua tipe dan *level* organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas belanja Pemilu Tahun 2024 selain yang variabel yang di teliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti partisipasi masyarakat, pemilu dan pemilihan secara serentak, proses penggunaan anggaran, dan permasalahan yang terjadi pada pemilu.

## References

- Afriyanto, N., & Putri, A. (2022). Evaluasi Perencanaan dan Penggunaan Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2016–2021: Studi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. *Jurnal* Vol.10 No.3, Edisi September, 1-15.
- Ardipandanto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal* Vol. XI, No. 11/I/Puslit, Juni, 1-20.
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature

- Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 1-15
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.
- Rosser, A. (2004). *The Political Economy of Resource Management in Indonesia*. Routledge.
- Tarina, U., Febrian, M. R., Cahyaning, I. P., & Nurcahya, W. F. (2024). Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Negara dalam Pemilihan Umum. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 785-800.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004). Republik Indonesia.